BAB III

DATA TENTANG GAYA KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DENGAN STAKEHOLDER TELEVISI DAN RADIO

A. Deskripsi Subyek Penelitihan

1. Profil KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)

a. Nama Instansi : KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)

b. Alamat Instansi : Jl. Ngagel Tim. No.52-54, Pucang Sewu, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60283.

c. Nama Pemimpin : A. Afif Amrullah

a) Sejarah KPID

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dibentuk karena amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 pasal 7 ayat 4 yaitu KPI terdiri dari KPI pusat dibentuk ditingkat provinsi dengan tujuan pasal 7 ayat 2 untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, anggota KPID Jatim berjumlah 7 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka, untuk selanjutnya ditetapkan secara administratif oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi. Begitu juga ungkapan dari Bapak Afif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Nah KPID pertama kali di Jawa Timur dibentuk pada tahun 2003 pertama kali terpilihlah 7 komesioner perwakilan dari masyarakat melalui seleksi lalu terpilih 7 orang. Terus ditengah jalan ada masalah lalu dibubarkan dan dibentuk periode yang baru dalam waktu 3 tahun perperiode. Kemudian dibentuk tahun berikutnya sampai 2010 dan sampai saat ini secara umum berjalan lancar"[50]

Periode 1 masa jabatan tahun 2003 – 2007

Untuk mengatur penyiaran di Jawa Timur , gubernur dan DPRD Jawa Timur membidani kelahiran KPID Jawa Timur. Bermula dari dikeluarkannya keputusan Gubernur Jawa Timur No : 118/209/KPTS/013/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Pembentukan Tim Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota KPID Jawa Timur. Kemudian ditetapkan tahapan – tahapan seleksi mulai dari pengumuman kepada masyarakat, pendaftaran, tes psikologi, Fit and proper test oleh DPRD, sampai diterbitkanSurat Keputusan Gubernur, Barulah pada 8 April 2004 KPID Jawa Timur terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No 189/90/KPTS/013/2004. Meski sudah mendapat SK sejak April 2004, namun Gubernur baru melantik pada tanggal 31 Desember 2004. KPID Jawa Timur ini terdiri atas 7 anggota. Sediannya, masa jabatan KPID Jawa Timur ini berakhir pada April 2007. Namun karena terus dilanda konflik internal yang tak berkesudahan, maka pada Agustus 2006 Gubernur H Imam Utomo memutuskan mencabut SK No

[50]Wawancara dengan Pak Afif, Tanggal 14 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

189/90/KPTS/013/2004 tentang pengangkatan anggota KPID Jawa Timur masa jabatan 2004-2007. Keputusan pemberhentian anggota KPID ini sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Komisi A DPRD Jawa Timur yang sejak September 2005 sudah meminta Gubernur membubarkan KPID Jatim.

Periode II masa jabatan 2007 – 2010

Selama KPID Jawa Timur dalam keadaan vakum, KPI Pusat akhirnya mengambil alih segala kewenangan KPID Jawa Timur. Hal ini untuk menghindari kevakuman dan demi kelanjutan pelayanan, segala kewenangan KPID Jawa Timur akan dipegang KPIP. Setelah sempat vakum hampir setahun, Gubernur Jawa Timur H Imam Utomo membentuk lagi KPID Jawa Timur yang beranggota 7 orang melalui SK No 188/216//KTPS/013/2007 pada tanggal 5 Juni 2007. Hal ini menindak lanjuti hasil uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh Komisi A DPRD Jawa Timur sebagaimana Surat Ketua DPRD Jawa Timur Nomor. 160/5355/050/2007 tertanggal 15 Mei 2007 perihal Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota KPID Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2007 – 2010.

KPID Jatim masa bakti 2007 – 2010 memulai tugas secara resmi sejak dilantik Gubernur Jawa Timur pada 11 Juni 2007. KPID Jatim memikul beban tugas yang berat akibat tidak terusnya berbagai tugas bidang legislasi penyiaran di daerah kelembagaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur penyiaran, dan pengawasan isi siaran di tengah kevakuman kelembagaan KPID Jatim periode masa bakti sebelumnya. Salah satu kebijakan strategis yang dibuat KPID Jatim pada tahun pertama adalah kemampuan membuat kerangka fundamental dan regulasi penyiaran di Jawa Timur yang disusun dengan melakukan berbagai tahapan termasuk konsultasi publik hingga melahirkan mekanisme dan prosedur kerja yang menjadi landasan normatif pembukaan loket perzinan. Bidang tugas KPID sesuai dengan peraturan. Kelembagaan KPID Nomor 01 Tahun 2007 pasal 11 meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran dan kelembagaan.

Periode III masa jabatan 2010 – 2013

Pada tahun 2010 KPID Jatim tepatnya tanggal 5 Juni 2010 berakhir masa jabatannya, karena KPID Jatim telah mempunyai Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 2009, maka DPRD Provinsi memberi mandat/kewenangan bahwa seleksi administratif diserahkan kepada Sekretariat. Sehingga pada bulan Februari tahun 2010 dimulilah pembahasan mengenai proses rekrutmen calon anggota KPID Jatim masa jabatan 2010-2013. Setelah mengalami proses dari pembentukan panitia, pendaftaran, tes seleksi, tes psikologi, dan lain sebagainya hingga debat publik. Setelah debat publik nama-nama calon anggota KPID Jatim 200-2013 diserahkan ke DPRD Provinsi Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur dalam hal ini komisi A, untuk menjalani fit and proper tes. Dan setelah melakukan fit and proper tes yang dilakukan oleh DPRD Provinsi, maka diumumkan melalui Surat Pengumumn Nomor 160/4964/060/2010 tentang nama-nama 7 (tujuh) Anggota KPID Jawa Timur masa jabatan 2010-2013 dan dikukuhkan pada tanggal 13 Agustus 2010 oleh Bapak Gubernur Jawa Timur.

b) Visi dan Misi

Visi

Menjadi Lembaga Independen yang Berdaya Membangun Dunia Penyiaran di Jawa Timur

Misi

1. Mendorong lembaga penyiaran memenuhi perizinannya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memastikan lembaga penyiaran mematuhi P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program Siaran).
3. Mendorong lembaga penyiaran agar berperan serta dalam pembangunan yang digelorakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Mendorong lembaga penyiaran menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan semangat kebhinekaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berperan meningkatkan kualitas SDM lembaga penyiaran sehingga mampu bersiaran secara proessional.
6. Berperan meningkatkan kualitas SDM lembaga penyiaran memproduksi siaran yang berkualitas, mendidik, bermoral, objektif dan menghibur.
7. Berperan mengupayakan persaingan yang sehat diantara lembaga penyiaran.
8. Membangun jaringan masyarakat peduli media.

c) Struktur Organisasi

KPID Jatim terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa jabatan tahun 2016-2019. Nama dan jabatan anggota KPID Jatim sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	A. Afif Amrullah, M.EI	Ketua KPID
2.	Bashlul Hazami, S.EI.,M.SEI	Wakil Ketua KPID
3.	Eko Rinda Prasetyadi, SH	Bidang Kelembagaan dan SDM
4.	Gandi Wicaksono, S. IP	Bidang Sosialisasi dan Literasi Media
5.	Amalia Rosyadi Putri, S.Kom.I, M.Med.Kom	Bidang Pengawasan Isi Siaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, S.Th, M.A., M.I.Kom, M.H	Bidang Penindakan Pelanggaran Isi Siaran
7.	Nur Elya Anggraini, S.Sos	Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran

3.1 Struktur Organisasi

d) Logo Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

KPID Jatim
Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Jawa Timur

3.2 Logo KPID

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Profil Informan

Subyek pada penelitihan ini adalah para Kepemimpinan KPID Jawa Timur. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informan 1 :

Nama : A. Afif Amrullah

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Ketua KPID

Afif Amrullah, selaku ketua KPID Jatim. Alasan peneliti memilih subyek ini karena selain ketua dari KPID Jatim Bapak Afif juga sebagai Kepemimpinan yang berpengaruh terhadap perkembangan lembaga.

Jadi, dengan adanya subyek peneliti ini dapat diperoleh bagaimana gaya komunikasi Kepemimpinan KPID. Apalagi, Bapak Afif juga mempunyai background sebagai pemberi masukan dalam sejumlah forum Evaluasi Dengan Pendapat (EDP) yang diadakan oleh KPID Jawa timur.

Sehingga sudah mengetahui akan gaya komunikasi yang dilakukan para Kepemimpinan KPID dengn Stakeholder Televisi dan Radio.

b. Informan 1 :

Nama : Immanuel Yosua Tjiptosoewarno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Isi Siaran

Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, Alasan peneliti memilih subyek ini karena Pak Immanuel sebelum menjadi Komisioner KPID Jawa Timur, ia adalah Komisioner Komisi Pelayanan Publik (KPP) Periode 2012-2016. Ketertarikannya menjadi komesioner KPID Jawa Timur didorong oleh kerinduannya untuk turut mendorong terciptanya penyiaran sehat di Jawa Timur. Di jajaran KPID Jawa Timur periode 2016-2019, mantan jurnalis, Motivasi pendiri Jatim Media Wacth dan Praktisi pendidikan ini menjabat sebagai koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Isi Siaran.

c. Informan 3 :

Nama : Dwi Retno Palupi

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Staf Perijinan

Ibu yang biasa dipanggil upi mempunyai jabatan dibagian perizinan, serta memberikan pelayanan informasi yang terkait dengan prosedur perizinan, juga mengurusi pemberkasan. Sudah 9 tahun ibu upi bekerja di KPID, awalnya sebagai staf humas dan kelembagaan lalu di bagian peruangan, di isi siaran dan terakhir diperizinan, fokus diperizinan tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2010. Ibu upi ini sosok yang sangat tegas, karena juga dibagian perizinan jadi harus memiliki sifat tersebut.

d. Informan 4 :

Nama : Yeni Kusuma Ningsih

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Staf Perizinan

Dari 2007 ibu yeni bergabung di KPID, pertamakali masuk dibagian pengawasan isi siaran selanjutnya tahun 2014 dibidang perizinan sampai sekarang.

e. Informan 5 :

Nama : Sri Wahyuni

Pendidikan Terakhir : SLTA

Jabatan : Staf Monitoring

Mulai 2007 sampai sekarang Ibu Sri bekerja di KPID, awalnya Ibu Sri dibagian perizinan. yang membuat Ibu Sri tertarik bekerja di KPID yaitu bisa terjun langsung dengan orang-orang televisi dan radio.

B. Data tentang Gaya Komunikasi Kepemimpinan dengan Stakeholder Televisi dan Radio

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan berpedoman pada pertanyaan penelitian atau teknik wawancara dan observasi langsung oleh peneliti turun ke lapangan dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui data dan mendapatkan dokumentasi secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Peneliti memfokuskan penelitian pada Gaya Komunikasi Kepemimpinan KPID dengan Stakeholder Televisi dan Radio. Peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana cara penyampaian pesan serta gaya bahasa Kepemimpinan KPID dengan stakeholder televisi dan radio. Setiap penelitian haruslah memiliki data yang konkrit dan mampu dipertanggung jawabkan. Sehingga data dalam penelitian diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data. Selain itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti diharapkan memahami dan mampu menguraikan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya.

1. **Cara Penyampaian Pesan Kepemimpinan KPID dengan Stakeholder Televisi dan Radio.**

   Supaya komunikasi bisa berjalan secara efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa keberhasilan komunikasi sebagian ditentukan oleh kekuatan pesan. Dengan pesan, seseorang dapat mengendalikan sikap dan perilaku komunikan.[51]Jadi perlu adanya suatu keahlian dalam berkomunikasi dari berbagai teknik dengan tujuan agar bisa lebih maksimal dalam berkomunikasi.

[51]Rakhmat, Jalaluddin. 1993. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyampaikan pesan, seorang komunikator tidak perlu terlalu ambisi untuk mencapai hasil segera. Untuk dapat mempengaruhi komunikan secara efektif, penyampaian pesan perlu memperhatikan langkah-langkah, yang pertama *Attention* (perhatian) bahwa pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian dari komunikan, yang kedua *Need* (kebutuhan) komunikator kemudian berusaha meyakinkan komunikan bahwa pesan yang disampaikan itu penting bagi komunikan, yang ketiga *Satisfaction* (pemuasan) komukator memberikan bukti bahwa yang disampaikan adalah benar, yang keempat *Visualization* (visualisasi) komunikator memberikan bukti-bukti lebih kongkret sehingga komunikan bisa turut menyaksikan, yang terakhir *Action* (tindakan) komunikator mendorong agar komunikan bertindak positif yaitu melaksanakan pesan dari komunikator tersebut.[52]

Cara penyampaian pesan memang berpengaruh terhadap keefektifan proses komunikasi. Cara penyampaian yang baik, akan memudahkan komunikan dalam menerima dan memahaminya.

a. Komunikasi Transparan

Transparasi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di dalam KPID yaitu keterbukaan dalam menegakkan peraturan yang ada serta pertanggung jawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan

[52]Suranto AW, 2006, Komunikasi Efektif Untuk Mendukung Kinerja Perkantoran (http:/www.google.com/komunikasi/2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak televisi dan radio bisa mengetahui apa peraturan ketika menayangkan isi siaran.

Menjaga transparasi dan komunikasi adalah penting sekali untuk mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang merugikan antara KPID dengan Stakeholder Televisi dan Radio serta masyarakat. Tanpa adanya trasnparasi dan komunikasi kerugian yang besar berpotensi kuat untuk terjadi, apapun alasannya transparasi dan komunikasi harus tetap dikedepankan.

> "Misalnya kalo KPID itu punya kebijakan khusus yang harus diketahui oleh media termasuk juga masyarakat itu ada proses konferensi pers dimuat-muat dimedia massa agar diketahui oleh publik."[53]

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Afif saat ditemui di ruangan kerjanya dan sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa KPID telah melakukan beberapa program seperti yang disebutkan diatas. Dari beberapa program tersebut terdapat adanya keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Misalnya terkait kebijakan khusus yang seharusnya diketahui oleh pihak media. Hal ini merupakan suatu proses yang mesti dilalui oleh televisi dan radio ketika melakukan komunikasi secara langsung sehingga publik bisa mengetahui secara transparan dan tidak menimbulkan segala macam bentuk interpretasi negatif.

[53]Wawancara dengan Pak Afif, Tanggal 14 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "terkadang kita mengundang mereka namanya sosialisasi, misalnya ada peraturan mentri yang baru itu kita pasti mengundang mereka untuk dilakukan sosialisasi supaya mereka tau apasih aturan yang baru itu, kebijakan penyiaran yang up to date itu apa. Maka dari itu kita mengadakan sosialisasi dengan mereka"[54]

Selain KPID melakukan konferensi pers yang nantinya dimuat oleh media, pihak KPID juga melakukan sosialisi terhadap televisi dan radio terutama terkait peraturan mentri terbaru mengenai hal-hal yang berkenaan dengan isi siaran. Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan, karena ketika ada peraturan-peraturan yang baru, pihak KPID bisa menyampaikannya secara langsung terhadap Stakeholder Televisi dan Radio. Pihak televisi dan radio juga dapat mengajukan beberapa pertanyaan ketika ada beberapa hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti, semacam diskusi tanya jawab antara Kepemimpinan KPID dengan Stakeholder Televisi dan Radio. Jadi dengan adanya sosialisasi tersebut mereka bisa saling bertukar pendapat saling terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi juga paham dengan adanya peraturan tersebut. Pak yosua berkata

> "proses komunikasinya bisa secara langsung ya, kita undang mereka atau kita datang terkait mungkin pada saat proses perizinan ferivikasi aktual. Jadi kita langsung komunikasi, misalnya kekurangannya ini ini ini, dan kita evaluasi atau mungkin ketika terjadi pelanggaran isi siaran, itu mereka kita panggil. Tapi

[54]Wawancara dengan Ibu Yeni, Tanggal 19 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> paradikmanya kita tidak sekedar mengasih sangsi atau memeberi sangsi tapi kita juga diskusi, kenapa kok sampek terjadi? Aturannya ngomong seperti ini, ketika mereka keberatan dan lain-lain itu ada ruang." [55]

3.3 klarifikasi

Setelah diadakaanya sosialisasi yang membahas tentang peraturan-peraturan terbaru maupun peraturan yang telah disepakati bersama antara Kepemimpinan KPID dengan Stakeholder Televisi dan Radio, dan dalam perjalanannya pihak televisi dan radio ada yang melanggar aturan tersebut, maka pihak KPID melakukan suatu teguran berupa panggilan secara langsung kepada pihak yang terkait. Namun tidak secara langsung diberikan sangsi tetapi diajak untuk berdiskusi dengan tujuan melakukan evaluasi tentang alasan mengapa sampai terjadi suatu pelanggaran. Dan ketika mereka keberatan mengenai aturan tersebut, ada suatu

[55]Wawancara dengan Pak Yosua, Tanggal 20 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses untuk mengkaji ulang atau melakukan klarifikasi untuk membahas lebih lanjut mengenai aturan tersebut. Karena pihak KPID tidak hanya menegur dan memberikan sangsi saja namun juga sebagai pendamping untuk pembinaan masalah isi siaran.

Dengan adanya diskusi itu pihak televisi dan radio dapat lebih memahami tentang isi konten penyiaran yang sehat, dan dengan adanya teguran tersebut pihak televisi dan radio dapat lebih berhati-hati lagi ketika menayangkan ke publik sehingga tidak akan ada lagi suatu pelanggaran terkait aturan-aturan yang sudah disepakati secara bersama.

b. Komunikasi Berlapis

Komunikasi berlapis ini seperti menggunakan Whatsapp, sms, atau telfon untuk memberikan informasi kepada pihak televisi dan radio, dengan menggunakan media tersebut dapat membantu komunikasi agar informasi dapat diterima dan cepat serta komunikasi yang terhalang jarak bisa teratasi dengan adanya aplikasi tersebut.

> "kita selaku penegak regulasi terkait dengan aturan-aturan penyiaran, perizinan. Tetapi disaaat yang sama kita ini adalah pihak yang wajib melakukan pembinaan terhadap mereka (pendampingan). Cara penyampaian pesan pertama melalui media, tapi ya harus dilapis, media pun kalo gak dilapis kan rawan memunculkan miss komunikasi. Misalnya mereka ngemail kan, emailkan harus dilapis. Okeh kita baca tapi kita gak ngerti maksudnya, dilapis komunikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bisa telfon bisa WhatsApp atau sms. Kan begitu kan, semisal kita ngomong "oh ya tadi kita ngemail yaa" akhirnya dicek lagi. Nah setelah dicek lagi ada titik diskusi disana. Kalo memang sudah bener-bener tidak bisa make media ya harus ketemu. Jadi memang harus berlapis. Tergantung kebutuhan"[56]

Pihak KPID ketika memberikan informasi cara penyampian pesan yang pertama melalui media. Namun tidak hanya satu media saja karena jika hanya memakai satu media terkadang pesannya tidak sampai kepada pihak televisi dan radio, maka dari itu pihak KPID melakukan pengiriman pesan melalui beberapa media. Semisal yang pertama melalui e-mail lalu dilanjut melalui sms, kalo masih tidak ada respon maka pihak KPID menggunakan via telfon. Jadi informasi dari KPID harus dipastikan benar-benar sampai ke pihak televisi dan radio.

> "melalui telfon dan email kita menanyakan sampai mana proses perizinannya? Terus apakah ada kekurangan berkas yang harus dipenuhi.. gitu"[57]

Dari pihak perizinan juga seperti itu. Selalu menanyakan apa yang kurang serta sampai mana proses perizinannya. Komunikasi mengenai perizinan ini sangat penting dilakukan karena ketika ada berkas-berkas yang kurang itu pihak KPID langsung menghubungi televisi dan radio melalui telfon atau e-mail terlebih dahulu. Dan

[56]Wawancara dengan Pak Afif, Tanggal 14 Juni 2017
[57]Wawancara dengan Ibu Upi, Tanggal 14 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga ketika masa berlaku perizinan sudah habis maka pihak KPID juga harus langsung menghubungi televisi dan radio, karena agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar pihak televisi dan radio juga harus tetap mengkonfirmasi ketika ada pergantian nomer telfon atau perpindahan tempat itu harus menghubungi pihak KPID baik via e-mail, via suara atau media lainnya.

Pada dasarnya pihak KPID dengan stakeholder televisi dan radio itu saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu kedua belah pihak harus tetap menjaga komunikasi dengan baik, baik itu melalui media atau secara langsung Komunikasi antara Kepemimpinan KPID dengan stakeholder televisi dan radio harus jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh KPID, dimana data yang dilaporkan KPID mencerminkan realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera diinformasikan kepada semua pihak yang terkait (stakeholder). Dengan seperti itu maka komunikasi tetap terjaga dengan baik, seperti halnya ketika mengurus surat perizinan ataupun menegur masalah isi siaran itu bisa lewat media terlebih dahulu, seperti via e-mail, sms, telfon dan lain-lain.

2. Gaya bahasa Kepemimpinan KPID dengan Stakeholder Televisi dan Radio

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan berbahasa dalam komunikasi ialah menyampaikan maksud. Pesan yang diberikan kepada lawan bicara diharapkan dapat dipahami dengan tepat. Namun, bahasa juga berguna sebagai sarana pembinaan hubungan sosial yang baik antar penutur. Gaya bahasa boleh jadi salah satu media yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi bahasa tersebut.

Gaya bahasa kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya dapat kita ketahui dari lisan maupun tulisan. Gaya bahasa bila didefinisikan adalah cara khas seseorang dalam menyampaikan informasi yang dimaksudkan. Dengan arti lain, dalam komunikasi si penutur menentukan pilihan kata supaya menimbulkan efek. Ketika gaya dimanfaatkan, ucapan dari penutur akan memunculkan nilai rasa tertentu bagi pendengarnya.

Berikut ini ada beberapa gaya bahasa dalam komunikasi antara Kepemimpinan KPID dengan stakeholder televisi dan radio:

a. Gaya Bahasa Tegas

Salah satu sikap yang harus dimiliki seseorang terutama seorang pemimpin adalah sikap tegas. Tegas adalah salah sesuatu yang tidak lemah lembut (gemulai). Secara umum, tegas adalah sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan secara jelas, dan pasti. Jika salah dikatakan salah dan jika benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan benar tanpa memandang kondisi atau kepada siapa hal tersebut diutarakan

Gaya bahasa tegas ini biasanya digunakan pada waktu resmi atau formal, dengan menggunakan bahasa tegas ini agar tidak tampak plin-plan dalam berbicara, serta lawan bicara bisa menghormati dan dapat mematuhi peraturan yang ada.

> "Interaksi bagi kami yang pertama itu formal. Ketika pertama kita mengadakan acara pembinaan ataupun informasi terkait dengan regulasi baru. Ini sifatnya bisa berupa langsung atau tidak langsung."[58]

Dalam melakukan interaksi Kepemimpinan KPID menggunakan bahasa formal sebagai bahasa utama dalam berinteraksi, terutama ketika mengadakan suatu acara pembinaan ataupun informasi yang terkait dengan regulasi terbaru. Pihak KPID lebih menggunakan bahasa formal, karena ini sifatnya resmi. Jadi adanya bahasa formal merupakan suatu keharusan yang memang seharusnya digunakan pada kondisi tertentu yang memungkinkan untuk mengunakannya dengan tujuan untuk memperoleh atau mengetahui tentang bagaimana perkembangan bahasa. Dari segi penyampaian bahasa formal, KPID bisa

[58]Wawancara dengan Pak Yosua, Tanggal 20 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakannya melalui secara langsung ataupun tidak langsung dengan ketentuan jika tidak langsung maka KPID harus memberikan surat resmi kepada stakeholder televisi dan radio. Karena ketika KPID menyampaikan mengenai tentang adanya isi siaran itu harus lebih tegas agar nantinya pihak televisi dan radio juga mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

> "sebagai regulator atau sebagai pengawas itu memakai komunikasi formal. Artinya bisa hampir semua proses komunikasi itu dilandasi dengan sesuatu yang harus tertulis" [59]

3.4 Monitoring

Tidak hanya sebagai regulator tetapi sebagai pengawas isi siaran juga harus tegas, karena ketika pihak televisi dan radio melakukan pelanggaran tetapi pihak KPID menegurnya dengan

[59]Wawancara dengan Pak Afif, Tanggal 14 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gaya bahasa santai maka akan disepelkan, dan akan melanggar lagi. Agar tidak terjadi hal tersebut maka pihak KPID lebih tegas untuk melakukan peneguran. Dan dari pihak KPID juga ketika sebagai regulator atau pengawas isi siaran mereka lebih tegas untuk melakukan komunikasi dengan pihak televisi dan radio.

> "kalo saya itu dianggap sebagian orang itu teges, to the poin. Jadi kalo untuk basa basi itu kurang bisa. Karena saya juga sebagai staf perizinan jadi saya harus tegas dan lebih memakai bahasa formal."[60]

Sifat ibu upi dari awal memang sudah tegas, apalagi tugasnya mengurus perizinan pihak televisi dan radio, itu sangat diharuskan untuk bersifat tegas. Karena ketika pihak televisi dan radio melakukan perizinan namun dilayani dengan santai oleh pihak KPID maka tidak akan selesai – selesai urusan tersebut, ketika ada yang kurang datanya itu pasti akan disepelekan oleh pihak televisi dan radio. Jadi agar tidak terjadi hal tersebut maka pihak KPID harus tegas untuk melakukan pelayanan perizinan, sehingga pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik.

> "kalo waktu perizinan kita memakai bahasa formal. Misalkan koordinasi atau apa itu beda sih kita lebih

[60]Wawancara dengan Ibu Upi, Tanggal 14 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

santai. Kalo terkait dengan perizinan kita harus ini..ini..ini lebih saklek gitu kan"[61]

Bu yeni juga sependapat dengan bu upi, mereka sebagai staf perizinan harus benar-benar tegas. Karena ketika mengurus perizinan itu tidak segampang naruh proposal dapat balasan itu tidak, tetapi masih banyak data yang harus diurus. Pihak televisi dan radio juga tidak dapat mengelak ketika dimintahi data-data untuk pengurusan perizinan. karena bersifat mutlak harus dilakukan, tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

b. Gaya Bahasa Santai

Gaya bahasa santai ini digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang, menggunakan bahasa sehari-hari. Ketika menggunakan bahasa santai ini lawan bicara bisa lebih terbuka dan tidak kaku untuk berkomunikasi.

"misalnya ada yang konsultasi sebagai mitra kan gitu ya, ada yang konsultasi soal perizinan, konsultasi isi siaran dll itu kita lebih santai. Karena dengan gaya bahasa tersebut kita bisa semakin akrab dan saling terbuka satu sama lain"[62]

[61]Wawancara dengan Ibu Yeni, Tanggal 19 Juni 2017
[62]Wawancara dengan Pak Afif, Tanggal 14 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai mitra Kepemimpinan KPID lebih menggunakan bahasa Informal atau santai. Seperti melakukan konsultasi perizinan, konsultasi isi siaran itu lebih menggunakan bahasa yang santai, agar dari pihak radio dan televisi juga menanggapinya santai, lebih akrab dan saling terbuka. Misalkan sudah menjalin keakraban pihak televisi dan radio juga bisa santai untuk melakukan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan tidak merasa canggung.

> "waktu klarifikasi itu kita lebih santai dan memberikan himbauan, mengklarifikasi apa yang dilanggar. Gitu kan kalo diomongkan secara santai kan enak"[63]

Ketika melakukan komunikasi yang santai pihak KPID juga dapat memberikan himbauan. Bagaimana agar sama – sama menciptakan isi siaran yang sehat dan ketika pihak KPID mengklarifikasi apa yang dilanggar oleh pihak televisi dan radio mereka dapat bertukar pendapat, dan juga dapat mengajukan pertanyaan.

[63]Wawancara dengan Ibu Sri, Tanggal 19 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id